

MODEL EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN BERBASIS WISATA ALAM DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

(Effectiveness Model of the Nature Tourism Based Community Forest Program Implementation in Bangka Tengah District)

OKTEDY ANDRYANSAH¹⁾, DODIK RIDHO NURROCAHMAT²⁾ DAN NANDI KOSMARYANDI³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga PO Box 168 Bogor, 16680

²⁾ Departemen Manajemen Hutan, Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga PO Box 168 Bogor, 16680

³⁾ Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Jl. Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Email: super_dexter81@yahoo.com

Diterima 04 April 2019 / Disetujui 21 Juni 2019

ABSTRACT

Nature tourism-based community forest (NTCF) is one form of community forest utilization in Bangka Tengah District. In its implementation, the effectiveness of this program is relatively different among community forest groups. This difference of effectiveness level could be influenced by various factors. Therefore, identification of these factors needs to be taken into consideration in making decisions to improve the effectiveness of the intended program. This study aims to identify the influencing factors and efforts to improve the effectiveness of NTCF implementation. The method used is the structural equation modeling and qualitative analysis. The results of the study showed that the factors that influence the effectiveness of the implementation are the attitude of the government, attitudes of community leaders, forestry extension human resources, attitudes of non-governmental organizations and the level of education of the community. For these reasons, the efforts should be conducted to achieve the effectiveness of the NTCF are to increase the support of community leaders, NGOs, and the government, increase the capacity of human resources for forestry instructors and provide education and training for the groups with relatively low levels of education.

Keywords: community forest, natural tourism, structural equation modeling, utilization

ABSTRAK

Hutan kemasyarakatan berbasis wisata alam (HKm-WA) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam penerapannya, efektivitas program ini relatif berbeda antara suatu kelompok HKm dengan kelompok lainnya. Perbedaan tingkat efektivitas ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan HKm-WA di Kabupaten Bangka Tengah. Metode yang digunakan adalah structural equation modelling dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan HKm-WA adalah sikap pemerintah, sikap tokoh masyarakat, sumber daya manusia penyuluh kehutanan, sikap lembaga swadaya masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas pelaksanaan HKm-WA adalah meningkatkan dukungan tokoh masyarakat, LSM dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia penyuluh kehutanan dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak kelompok HKm-WA dan prioritas pemberian pendidikan dan pelatihan bagi kelompok dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Kata kunci: hutan kemasyarakatan, wisata alam, structural equation modeling, pemanfaatan

PENDAHULUAN

Berbagai bentuk degradasi dan deforestasi terus terjadi di dalam kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah yang di antaranya disebabkan secara langsung oleh penambangan, pertanian komersil dan subsisten (Chakravarty *et al.* 2012; Noriko *et al.* 2012). Terkait dengan hal tersebut, Chakravarty *et al.* (2012) mengungkapkan bahwa strategi mengurangi deforestasi, di antaranya melalui manajemen hutan partisipatif. Oleh karena itu, hutan kemasyarakatan (HKm) dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi deforestasi, sebagaimana pernyataan Kaskoyo *et al.* (2014) bahwa

program perhutanan sosial (di antaranya HKm) dapat mengurangi deforestasi dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penemuan Pender *et al.* (2008) yang mengungkapkan adanya peningkatan jumlah tegakan pada areal lokasi HKm dan pendapatan petani HKm di Lampung pada kurun tahun 1999–2005. Gbedomon *et al.* (2016) juga mengungkapkan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga petani hutan masyarakat di Afrika Barat karena adanya akses untuk memanfaatkan hasil hutan melalui hutan kemasyarakatan. Lebih lanjut, Nurrochmat *et al.* (2016) menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan dapat diterapkan sebagai strategi kelola kelembagaan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan

kayu ataupun ekowisata. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menegaskan bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan izin HKm adalah jasa lingkungan berupa wisata alam. Kegiatan wisata alam mampu memberikan pengaruh positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat bila dikelola dengan baik (Job dan Paesler 2013; Ekayani *et al.* 2014) serta mendorong upaya konservasi hutan oleh masyarakat bila masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan wisata alam tersebut (Ekayani *et al.* 2014). Ekayani *et al.* (2014) menjelaskan bahwa kelestarian hutan berbanding lurus dengan keberlangsungan wisata alam. Hutan yang lestari menjamin pendapatan masyarakat dari wisata alam sehingga memotivasi masyarakat untuk mempertahankan keberadaan dan fungsi hutan.

Pemberian izin HKm dan areal kerja yang definitif belum menjadi jaminan bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat (Moeliono *et al.* 2015). Implementasi suatu program yang sama dapat memberikan dampak yang berbeda pada lokasi yang berbeda (Purwanto dan Sulistyastuti 2012). Implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980) adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan terhadap orang-orang yang terdampak. Implementasi kebijakan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang dan terjadi saat hasil suatu program tidak dapat dicapai (Makinde 2005). Hal ini disebabkan oleh perbedaan kapasitas pelaksana program antar lokasi.

Program HKm berbasis wisata alam yang diterapkan di Kabupaten Bangka Tengah, menunjukkan perbedaan efektivitas dalam implementasinya oleh masing-masing kelompok. Perbedaan tingkat efektivitas ini dirasakan oleh masyarakat dari sisi ekologis maupun ekonomis setelah dua tahun pelaksanaan program. Pada satu sisi terdapat kelompok HKm yang relatif sukses mengelola izin HKm, namun pada sisi yang lain masih terdapat kelompok HKm yang belum mampu mengelola izin HKm tersebut. Dwidjowijoto (2007) menyatakan bahwa efektivitas suatu kebijakan/program sangat terkait dengan tujuan program tersebut. Hal ini sejalan dengan Steers (1985), efektivitas adalah kemampuan suatu

sistem program (dengan unsur sumber daya dan sarana tertentu) untuk memenuhi tujuan dan sasaran program tersebut. Program HKm yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan memiliki makna bahwa efektivitas program HKm harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan manfaat ekologi bagi hutan. Oleh sebab itu, efektivitas implementasi program HKm-WA mengacu pada indikator ekologi (kondisi tutupan hutan) dan ekonomi (kontribusi dan distribusi manfaat ekonomi HKm-WA). Lebih lanjut, keberhasilan/efektivitas implementasi suatu program/kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Edwards III (1980) menyebutkan faktor tersebut yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap dan sistem birokrasi. Hal ini memunculkan fenomena perbedaan tingkat efektivitas implementasi program yang sama pada daerah yang berbeda (Purwanto dan Sulistyastuti 2012). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi program HKm, dan (2) merumuskan upaya yang diperlukan untuk peningkatan efektivitas implementasi program HKm berbasis wisata alam tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Objek penelitian adalah tiga kelompok HKm berbasis wisata alam yang telah memiliki izin usaha HKm (Tabel 1). Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. Kuesioner dengan skala *likert* 1–5 digunakan untuk mengumpulkan data persepsi masyarakat terkait implementasi HKm yang meliputi tingkat efektivitas dan indikator-indikator variabel laten yang memengaruhi efektivitas tersebut. Tingkat skala *likert* 1–5 menunjukkan tingkat kesetujuan responden terhadap pernyataan positif pada kuesioner. Semakin positif respon responden maka semakin tinggi skala *likert* yang dipilih oleh responden. Skala *likert* 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=kurang setuju, 4=setuju dan 5=sangat setuju. Adapun Responden adalah seluruh anggota tiga kelompok HKm sebanyak 80 orang. Adapun informan berasal dari unsur pemerintah terkait, tokoh masyarakat dan akademisi.

Tabel 1 Kelompok HKm berbasis wisata alam di Kabupaten Bangka Tengah

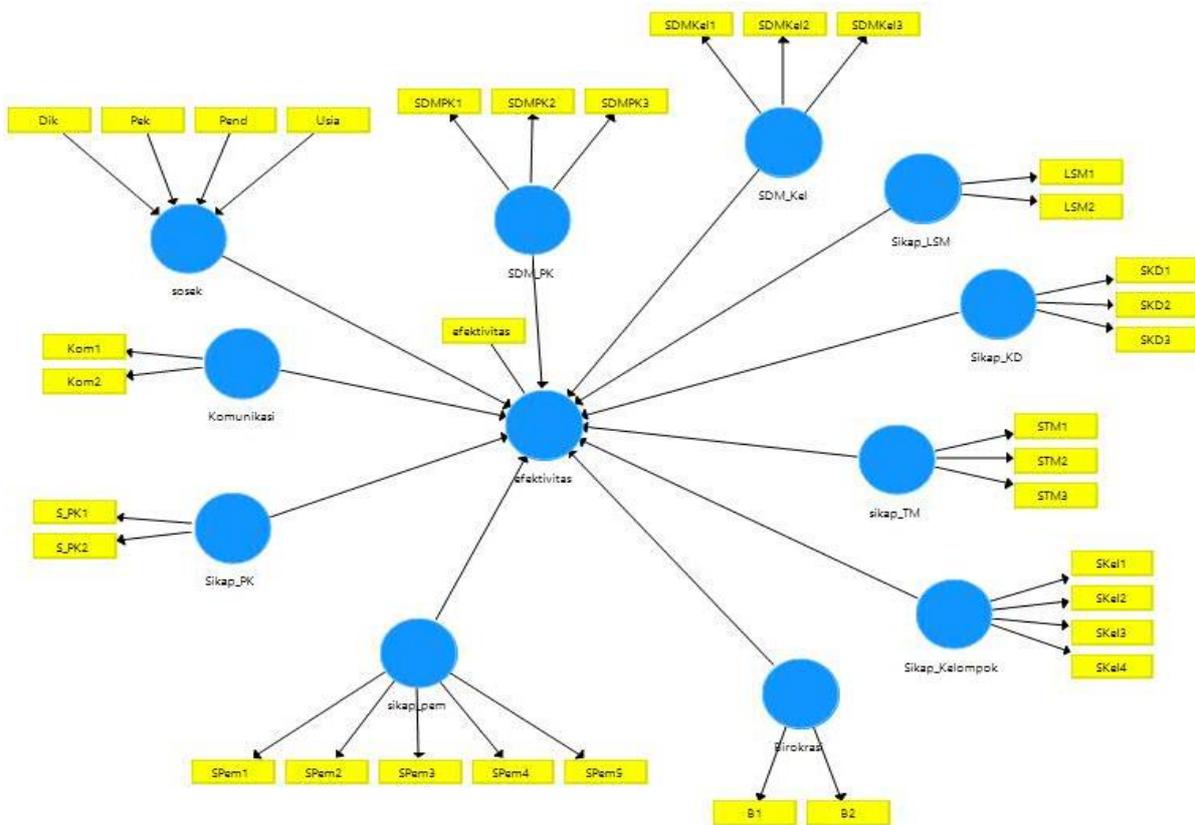
No	Kelompok HKm	Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm)	Lokasi IUPHKm	Jumlah Anggota	Luas (ha)
1.	Gempa 01	SK Gubernur No: 188.44/209/DISHUT/2016 tanggal 29 Februari 2016	Kawasan hutan lindung Pelawan	18	213
2.	Gempita	SK Gubernur No: 188.44/285/DISHUT/2016 tanggal 29 Maret 2016	Kawasan hutan lindung Lubuk Besar	36	148
3.	Tunas Harapan	SK Gubernur No: 188.44/207/DISHUT/2016 tanggal 29 Februari 2016	Kawasan hutan lindung Kurau	26	300

Efektivitas implementasi program HKm-WA adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan program. Program HKm-WA bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kondisi hutan. Oleh sebab itu, indikator efektivitas yang dicermati adalah indikator ekonomi yaitu distribusi dan kontribusi manfaat ekonomi bagi anggota kelompok dan indikator ekologi, yaitu kondisi tutupan hutan pada areal izin HKm. Indikator tersebut diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert.

Pendekatan *variance based structural equation modeling* (VB-SEM) atau *partial least square* (PLS) dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan efektivitas implementasi program HKm berbasis wisata alam. PLS lebih tepat digunakan di antaranya karena keterbatasan data yang tersedia, dan juga sebaran data yang tidak harus berdistribusi normal (Hair *et al.* 2012; Ringle *et al.* 2014). Dalam VB-SEM, indikator dengan skala kategori, ordinal, interval maupun ratio dapat digunakan pada model yang sama dengan jumlah sampel tidak harus besar. Selain itu, dalam VB-SEM, indikator yang

digunakan dapat bersifat reflektif maupun formatif (Ringle *et al.* 2014). Indikator reflektif bersifat menjabarkan variabel atau sebagai unsur yang digunakan untuk mengukur variabel laten. Adapun indikator formatif bersifat sebagai penyebab atau penyusun kondisi variabel laten. Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi HKm adalah model George Edward III (1980), yang selanjutnya dikembangkan menjadi sumber daya manusia (SDM) penyuluh kehutanan dan kelompok, sikap penyuluh kehutanan, sikap kelompok, sikap tokoh masyarakat, sikap kepala desa, komunikasi, sikap pemerintah, birokrasi, dan kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat (Gambar 1 dan Tabel 2). Analisis data menggunakan *software SmartPLS 3.0 student version*.

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk merumuskan upaya pengembangan HKm berdasarkan hasil analisis terhadap faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi HKm, hasil analisis regulasi terkait, dengan memerhatikan temuan lapangan dan hasil wawancara dengan informan.



Gambar 1 Konsep model struktural efektivitas program HKm-WA

Tabel 2 Variabel dan indikator efektivitas implementasi HKm-WA

No	Variabel laten	Simbol	Indikator	Simbol
Reflektif				
1.	Sumber daya manusia (SDM) penyuluh kehutanan	SDM_PK	Pemanfaatan teknologi untuk membantu kelompok masyarakat HKm Pemahaman peraturan tentang HKm Kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan kelompok HKm maupun pihak lainnya	SDMPK1 SDMPK2 SDMPK3
2.	SDM kelompok masyarakat	SDM_kel	Pemahaman tentang bentuk pemanfaatan jasa lingkungan Pemahaman terkait aktivitas illegal di dalam kawasan hutan Pemahaman akan pentingnya fungsi hutan lindung	SDMKel1 SDMKel2 SDMKel3
3.	Sikap penyuluh kehutanan	Sikap_PK	Membantu proses perizinan HKm Membantu dalam hal pengelolaan HKm	S_PK1 S_PK2
4.	Sikap kelompok masyarakat	Sikap_kel	Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui izin hutan kemasyarakatan untuk pemanfaatan wisata alam Keaktifan dalam setiap kegiatan kelompok HKm Kepercayaan di antara sesama anggota kelompok dan ketua HKm Intensitas komunikasi antara sesama anggota kelompok	SKel1 SKel2 SKel3 SKel4
5.	Sikap kepala desa	Sikap_KD	Membantu proses administrasi perizinan HKm Aktif dalam setiap rapat pengurus dan anggota HKm Aktif dalam memberikan motivasi dan saran bagi kelompok HKm	SKD1 SKD2 SKD3
6.	Komunikasi	Komunikasi	Penyuluhan/sosialisasi mengenai HKm Pemahaman terhadap materi sosialisasi	Kom_1 Kom_2
7.	Sikap pemerintah	Sikap_pem	Pemberian bantuan dana untuk pengelolaan HKm Pengadaan pelatihan dan pendampingan pengelolaan HKm Pemberian bantuan promosi wisata Pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha wisata Pemberian akses jaringan kerjasama usaha wisata	SPem1 SPem2 SPem3 SPem4 SPem5
8.	Sikap tokoh masyarakat	Sikap_TM	Pemberian motivasi kepada kelompok masyarakat di setiap pertemuan masyarakat Partisipasi dalam sosialisasi program HKm Pemberian masukan dan saran untuk pengelolaan HKm yang lebih baik	STM1 STM2 STM3
9.	Sikap LSM	Sikap_LSM	Pemberian dukungan dana Pengadaan pelatihan dan pendampingan pengelolaan HKm	LSM1 LSM2
10.	Birokrasi	Birokrasi	Kemudahan dalam proses pengurusan izin HKm Kemudahan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi	B1 B2
Formatif				
11.	Kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat	Sosek	Pendidikan Pekerjaan Pendapatan Usia	Dik Pek Pend Usia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Implementasi Program HKm Berbasis Wisata Alam

Penelitian menunjukkan bahwa hanya HKm Gempa yang efektif dalam implementasi program HKm-WA. Program HKm-WA mampu memberikan dampak ekologis dan ekonomis yang positif bagi anggota kelompok HKm. Kontribusi pendapatan dirasakan cukup memadai oleh anggota kelompok HKm Gempa. Kondisi ekologis kawasan HKm juga relatif terjaga dengan baik dari berbagai aktivitas perambahan, bahkan kegiatan rehabilitasi mangrove telah dilaksanakan oleh kelompok HKm. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh HKm Gempita. Program HKm-WA belum memberikan dampak ekonomis yang positif bagi anggota kelompok HKm, meskipun secara ekologis kondisi kawasan HKm relatif baik. Aktivitas kelola wisata belum dilaksanakan oleh HKm Gempita karena belum adanya bantuan modal usaha bagi kelompok. Adapun HKm Tunas Harapan, program HKm-WA belum memberikan dampak ekonomis sebab kelola usaha wisata belum dilakukan oleh kelompok HKm Tunas Harapan. Secara ekologis, kondisi kawasan HKm Tunas Harapan pun kerap masih terjadi perambahan hutan, akibat minimnya usaha perlindungan hutan oleh kelompok HKm.

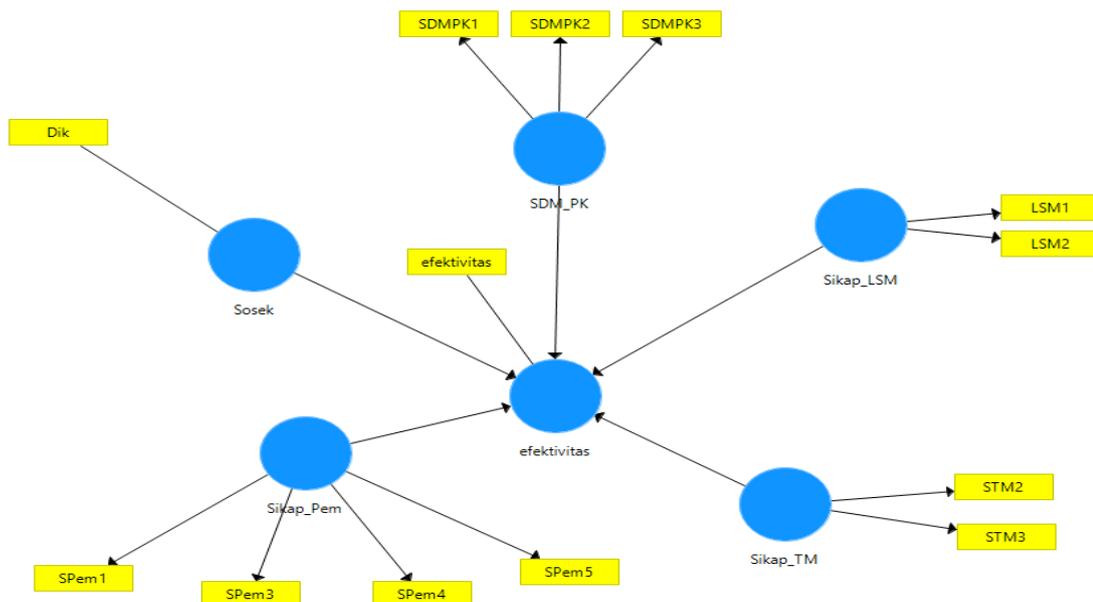
Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) diketahui bahwa terdapat lima faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap efektivitas implementasi program HKm-WA. Kelima faktor tersebut adalah sikap pemerintah, sikap

tokoh masyarakat, sumber daya manusia penyuluh kehutanan, sikap lembaga swadaya masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah (Sanudin *et al.* 2016), kapasitas penyuluh kehutanan (Suprayitno 2008) dan peran tokoh masyarakat (Suprayitno *et al.* 2015), dukungan LSM (Kaskoyo *et al.* 2014; Gbedomon *et al.* 2016; Sanudin *et al.* 2016), serta tingkat pendidikan (Senoaji 2011) menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi program HKm. Selanjutnya, path diagram hasil analisis PLS menunjukkan hubungan antara variabel laten sebagai variabel bebas dengan indikator-indikatornya dan variabel tak bebas (Gambar 2).

a. Evaluasi model pengukuran (*outer model*)

Model pengukuran variabel laten yang dibangun berdasarkan teori implementasi Edward III (1980) selanjutnya diuji dengan beberapa parameter. Analisis ini mencermati hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Kualitas model pengukuran menggunakan parameter uji disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil uji validitas (dengan memperhatikan nilai *outer loading* dan AVE) menggunakan SmartPLS, maka terdapat beberapa indikator reflektif dalam penelitian ini yang valid dan berpengaruh (Tabel 4). Adapun indikator formatif yang valid dilihat berdasarkan nilai *weight* indikator yang harus signifikan dengan variabel laten. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka indikator formatif yang valid berdasarkan kriteria tersebut adalah pendidikan (*outer weight*=1 dan *P-value*=0,000).



Gambar 2 Model struktural efektivitas implementasi HKm-WA hasil analisis PLS

Tabel 3 Parameter uji validitas dan realibilitas model pengukuran

Uji	Parameter	Standar
Validitas konvergen	Loading factor (outer loading)	>0,7
	Average Variance Extracted (AVE)	>0,5
Validitas diskriminan	Cross loading (Discriminant validity)	>0,7 dalam satu variabel
	Variance inflation factor (VIF)	<10
Reliabilitas	Cronbach alpha	>0,7
	Composite reliability (CR)	>0,7

Sumber: Hair *et al.* (2010); Kock (2013)

Tabel 4 Indikator reflektif yang valid dan realibel pada uji validitas dan realibilitas model pengukuran.

Variabel laten	Indikator	Outer loading	Nilai AVE	Nilai CR
SDM_PK	SDMPK1	0,947	0,867	0,951
	SDMPK2	0,935		
	SDMPK3	0,911		
Sikap_pem	SPem1	0,879	0,861	0,961
	SPem3	0,964		
	SPem4	0,948		
	SPem5	0,918		
Sikap_TM	STM2	0,989	0,976	0,988
	STM3	0,987		
Sikap_LSM	LSM1	0,927	0,784	0,879
	LSM2	0,842		

Tabel 5 Model struktural hasil analisis PLS dan variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi HKm-WA di Kabupaten Bangka Tengah

Hubungan kausalitas	Koefisien parameter	Standard deviasi	T-Statistik	P-values
SDM_PK → efektivitas	0,14	0,06	2,53	0,01
Sikap_LSM → efektivitas	0,39	0,16	2,17	0,03
Sikap_TM → efektivitas	0,28	0,11	2,72	0,01
Sikap_Pem → efektivitas	0,30	0,08	3,99	0,00
Sosek → efektivitas	0,17	0,09	2,16	0,03

b. Evaluasi model struktural (inner model)

Model struktural dapat dievaluasi dengan melihat nilai R² pada variabel endogen (Chin 1998) dan koefisien parameter jalur (Hair *et al.* 2010). Penelitian ini menguji 11 hipotesis:

- H1: SDM penyuluh kehutanan berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H2: SDM kelompok masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H3: Sikap penyuluh kehutanan berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H4: Sikap kelompok masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H5: Sikap kepala desa berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H6: Komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H7: Sikap pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H8: Sikap tokoh masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H9: Sikap LSM berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H10: Birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas HKm
- H11: Kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap efektivitas HKm

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis *inner model* menggunakan SmartPLS, maka variabel yang

berpengaruh terhadap efektivitas implementasi HKm pada taraf nyata 5% adalah SDM penyuluh kehutanan, sikap LSM, sikap tokoh masyarakat, sikap pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi (Tabel 5). Tingkat signifikansi masing-masing variabel mengacu pada P-values berdasarkan taraf nyata yang digunakan (Hair *et al.* 2010).

Kelima variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi HKm-WA. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T-statistik yang lebih besar dari nilai T-Tabel pada taraf nyata 5% dan nilai P-values yang lebih kecil dari 0,05 untuk kelima variabel tersebut. Seluruh koefisien parameter bernilai positif. Hal ini bermakna bahwa hubungan variabel dependen dan independen berbanding lurus dan positif. Semakin baik nilai masing-masing variabel, maka akan semakin meningkat pula tingkat efektivitas implementasi program HKm-WA tersebut.

Berdasarkan koefisien parameter jalur (Tabel 5), maka model persamaan struktural yang terbentuk adalah sebagai berikut: Efektivitas HKm-WA = 0,14 SDM penyuluh kehutanan + 0,39 sikap LSM + 0,28 sikap tokoh masyarakat + 0,30 sikap pemerintah + 0,17 kondisi sosial ekonomi. Parameter jalur adalah parameter hasil analisis jalur yaitu teknik analisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan

urutan temporer. Koefisien parameter jalur digunakan sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan tersebut memiliki nilai R^2 sebesar 0,84 (84%). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variasi efektivitas HKm-WA dapat dijelaskan oleh variabel konstruk (SDM penyuluh kehutanan, sikap LSM, sikap tokoh masyarakat, sikap pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi) sebesar 84% sedangkan sisanya yaitu sebesar 16% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian. Variabel konstruk adalah variabel yang dibangun dari konsep faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi HKm-WA. Menurut klasifikasi yang digunakan oleh Chin (1998), maka nilai R^2 tersebut tergolong substansial (nilai $R^2 \geq 67\%$). Variabel di dalam model memiliki efek yang substansial dalam meningkatkan efektivitas program HKm-WA di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga perlu diperhatikan oleh pemerintah agar implementasi program tersebut berjalan efektif.

2. Upaya Peningkatan Efektivitas Implementasi Hkm Berbasis Wisata Alam

Fasilitasi bagi kelompok HKm pasca terbitnya izin harus diberikan oleh Pemerintah agar kegiatan HKm berjalan optimal (Moeliono *et al.* 2015) dan efektivitas program HKm dapat terwujud. Edwards III (1980), menyatakan bahwa tindak lanjut atas suatu keputusan dilakukan untuk mengetahui dan memperbaiki permasalahan dalam implementasi. Tindak lanjut diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

Implementasi yang efektif oleh kelompok HKm melalui wisata alam menunjukkan bahwa hutan lestari dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar mata pencaharian anggota kelompok HKm adalah sebagai petani (36,25%), nelayan (23,75%) dan buruh (15%), dengan tingkat ekonomi yang relatif rendah (51,25% anggota memiliki pendapatan di bawah UMP Bangka Belitung). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan bagi anggota kelompok serta kondisi tutupan hutan yang relatif terjaga pada areal izin HKm Gempa. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok HKm Gempa telah efektif dalam mengimplementasikan program HKm-WA di lokasi izinnya. Adanya manfaat ekonomi dan ekologi kegiatan wisata alam (Job dan Paesler 2013; Ekayani *et al.* 2014) perlu direspon Pemerintah sebagai alternatif sumber ekonomi masyarakat selain tambang timah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambang timah masih menjadi primadona masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya Desa Perlang, di sekitar lokasi HKm Tunas Harapan. Menurut Setiawan *et al.* (2018), Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah masih berkeinginan meningkatkan pendapatan daerah dari pertambangan. Hal ini ikut memicu terjadinya konversi hutan. Untuk itu, optimalisasi sumber daya hutan

diantaranya melalui pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membendung laju konversi hutan serta membuka peluang baru bagi sumber pendapatan daerah.

a. Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan

Penyuluh kehutanan adalah ujung tombak pembangunan kehutanan. Penyuluh kehutanan memiliki peran strategis untuk mendidik masyarakat agar mau dan mampu mengelola hutan dengan baik (Suprayitno 2008). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyuluh kehutanan yang ada saat ini belum memadai kualitas dan kuantitasnya. Jumlah penyuluh yang ada saat ini di Bangka Tengah (4 dari 5 orang) berlatar belakang pendidikan non kehutanan. Selain itu, para penyuluh belum menguasai teknologi (survey dan pemetaan). Kemampuan dalam memahami aturan dan berkomunikasi dirasakan masih perlu ditingkatkan. Sebanyak 40% anggota kelompok menyatakan bahwa kemampuan penyuluh dalam hal tersebut perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM Penyuluh kehutanan harus diarahkan pada pemanfaatan teknologi dalam membantu kelompok HKm, pemahaman terhadap aturan serta kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak. Hal ini diperlukan agar implementasi program HKm-WA dapat diimplementasikan dengan baik. Belum optimalnya peran pendampingan oleh penyuluh kehutanan menyebabkan pengelolaan HKm belum optimal (Nandini 2013).

b. Peningkatan partisipasi LSM

Secara umum, partisipasi LSM relatif rendah. Rendahnya partisipasi ini lebih disebabkan intensitas komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan LSM relatif lemah. Rendahnya peran LSM ditunjukkan oleh tidak adanya pendampingan, pelatihan maupun dukungan dana dari LSM kepada kelompok HKm-WA. Selanjutnya, dari ketiga kelompok HKm-WA yang ada, hanya HKm-WA Gempa yang pernah mendapatkan pendampingan dari LSM lokal Masyarakat Pecinta Alam. Oleh sebab itu, partisipasi LSM dalam implementasi program HKm-WA dalam pendampingan dan dukungan dana harus ditingkatkan. LSM mampu berperan dalam pembangunan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan HKm melalui pendampingan maupun pelatihan (Kaskoyo *et al.* 2014) terkait kelembagaan, pengelolaan hutan, kewirausahaan dan pengelolaan wisata. Selain itu, Gbedomon *et al.* (2016) menemukan bahwa pengelolaan hutan masyarakat memiliki ketergantungan finansial yang signifikan terhadap LSM. Oleh sebab itu, partisipasi LSM sangat dibutuhkan dalam implementasi program HKm-WA.

c. Peningkatan partisipasi tokoh masyarakat

Partisipasi tokoh masyarakat pada peningkatan program HKm-WA pada kelompok HKm-WA Gempa relatif baik dibandingkan kedua kelompok lainnya.

Tokoh masyarakat ikut mensosialisasikan program HKm-WA dan senantiasa hadir serta aktif memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelolaan HKm-WA dalam setiap pertemuan kelompok HKm. Pada 2 kelompok lainnya, partisipasi tokoh masyarakat relatif rendah disebabkan oleh tingkat kepedulian tokoh masyarakat yang relatif rendah terhadap program kehutanan akibat minimnya sosialisasi program oleh pemerintah. Pada kedua kelompok ini, 90,32% anggota kelompok menyatakan bahwa tokoh masyarakat kurang aktif mensosialisasikan program HKm. Selain itu, 88,7% anggota kelompok juga menyatakan bahwa tokoh masyarakat jarang hadir dan kurang aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi kelompok dalam pertemuan kelompok, maupun dalam kesempatan lainnya. Padahal, tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi dalam pengelolaan HKm-WA baik secara formal maupun informal. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat untuk bersikap dan bertindak. Tokoh masyarakat harus diarahkan agar mau dan mampu memotivasi serta memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan HKm dalam setiap pertemuan kelompok serta berpartisipasi aktif dalam sosialisasi program HKm. Suprayitno *et al.* (2015) menyatakan bahwa tokoh masyarakat berperan memotivasi dan mempengaruhi masyarakat untuk melestarikan hutan. Pelibatan tokoh masyarakat dalam tiap tahapan pengelolaan HKm harus dilakukan. Selain itu, dukungan tertulis tokoh masyarakat sebagai salah satu syarat dalam pengajuan izin HKm perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, verifikasi teknis sesuai Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Nomor P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, perlu melibatkan tidak hanya kepala desa tetapi juga tokoh masyarakat.

d. Peningkatan peran pemerintah

Peran Pemerintah dalam penyediaan anggaran untuk modal usaha, promosi wisata, sarana dan prasarana maupun akses jaringan kerjasama usaha berpengaruh nyata terhadap efektivitas program HKm berbasis wisata alam. Berdasarkan Perdirjen PSKL Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial, pemerintah pusat berperan dalam penyelenggaraan pembinaan sedangkan pemerintah provinsi berperan dalam memfasilitasi pembinaan HKm dimaksud (penyediaan anggaran modal usaha, promosi, sarpras maupun akses jaringan kerja sama). Pemerintah pusat perlu meningkatkan perannya dalam penyediaan anggaran usaha dan sarpras, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan. Adapun pemerintah provinsi lebih kepada pendampingan, pelatihan, promosi usaha wisata bagi kelompok HKm dan membangun komunikasi yang intensif dengan sektor pariwisata dan pemerintah desa. Lebih lanjut, peran pembinaan ini harus dikoordinasikan agar berjalan secara sinergis antar jenjang pemerintahan.

Oleh sebab itu, diperlukan komitmen (Meta *et al.* 2018) dan dukungan anggaran (Taufiqurrohman 2014; Sanudin *et al.* 2016; Meta *et al.* 2018) yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut belum berjalan optimal. Keterbatasan anggaran dan SDM serta minimnya koordinasi antarsektor terkait menjadi kendala tersendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah perlu mengupayakan dukungan anggaran dari sumber pihak ketiga seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) maupun LSM, selain dari anggaran sektor kehutanan dan pariwisata. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan komunikasi dan koordinasi antar sektor maupun antar jenjang pemerintahan. Dukungan tersebut harus diarahkan pada penguatan kelembagaan, kewirausahaan (Sanudin *et al.* 2016) dan pengelolaan hutan serta wisata alam bagi kelompok HKm.

e. Prioritas pendidikan dan pelatihan bagi kelompok dengan tingkat pendidikan anggota kelompok yang relatif rendah

Tingkat pendidikan anggota kelompok berpengaruh terhadap efektivitas implementasi HKm-WA. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan sebagian besar anggota kelompok HKm Gempa relatif lebih baik dibandingkan dengan kedua HKm lainnya (50% anggota kelompok berpendidikan SMU dan perguruan tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pendidikan anggota kelompok HKm maka semakin baik tingkat efektivitas implementasi program HKm. Kemampuan anggota kelompok dalam memahami substansi program HKm-WA dan penerapannya dalam mewujudkan tujuan program HKm-WA tersebut selaras dengan tingkat pendidikan yang dimiliki anggota kelompok. Senoaji (2011) menegaskan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan belum optimalnya pengelolaan hutan kemasyarakatan. Rendahnya tingkat pendidikan ini perlu disikapi dengan pemberian pendidikan dan pelatihan pengelolaan hutan dan usaha wisata alam oleh pemerintah dengan memprioritaskan kelompok HKm yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah.

SIMPULAN

1. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap efektivitas implementasi HKm berbasis wisata alam di Kabupaten Bangka Tengah adalah sumber daya manusia penyuluh kehutanan, sikap lembaga swadaya masyarakat, sikap tokoh masyarakat, sikap pemerintah, dan tingkat pendidikan.
2. Untuk mewujudkan implementasi program HKm-WA yang efektif diperlukan peningkatan dukungan tokoh masyarakat, LSM, pemerintah dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penyuluh kehutanan serta peningkatan kualitas pendidikan kelompok HKm dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak kelompok HKm-WA. Komitmen pemerintah adalah

kunci dalam peningkatan efektivitas implementasi program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chakravarty S, Gosh SK, Suresh CP, Dey AN, Shukla G. 2012. Deforestation: Causes, Effects and Control Strategies. Di dalam: C. A. Okia, editor. *Global Perspective on Sustainable Forest Management* (pp. 1-28). Rijeka (CR): InTech. Diunduh dari <http://www.intechopen.com/books/globalperspectives-on-sustainable-forest-management/deforestation-causes-effects-and-control-strategies>.
- Chin WW. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. Di dalam: G. A. Macoulides, editor. *Modern methods for business research*. New Jersey (US): Lawrence Erlbaum Associates. hlm 295-336.
- Dwidjowijoto RN. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta (ID): PT. Elex Media Komputindo.
- Edwards III GC. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC (US): Congressional Quarterly Press.
- Ekayani M, Nuva, Yasmin R, Sinaga F, Maaruf LOM. 2014. Wisata alam taman nasional Gunung Halimun Salak: Solusi kepentingan ekologi dan ekonomi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 19(1): 29-37.
- Gbedomon RC, Floquet A, Mongbo R, Salako VK, Fandohan AB, Assogbadjo AE, Glèlè Kakai R. 2016. Socio-economic and ecological outcomes of community based forest management: A case study from Tobé-Kpobidon forest in Benin, Western Africa. *Forest Policy and Economics*. 64: 46-55. doi: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.01.001>.
- Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE. 2010. *Multivariate Data Analysis*. New Jersey (US): Pearson Prentice Hall.
- Hair JF, Sarstedt M, Ringle CM, Mena JA. 2012. An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 40(2): 414-433. doi: <https://doi.org/10.1007/s11747-011-0261-6>.
- Job H, Paesler F. 2013. Links between nature-based tourism, protected areas, poverty alleviation and crises—The example of Wasini Island (Kenya). *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*. 1-2: 18-28. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jort.2013.04.004>.
- Kaskoyo H, Mohammed AJ, Inoue M. 2014. Present state of community forestry (hutan kemasyarakatan/HKm) program in a protection forest and its challenges: case study in Lampung Province. *J For Sci*. 30(1): 15-29. doi: <http://dx.doi.org/10.7747/JFS.2014.30.1.15>.
- Kock N. 2013. *WarpPLS 4.0 user manual*. Texas (US): ScriptWarp Systems.
- Makinde T. 2005. Problems of policy implementation in developing nations: the Nigerian experience. *Journal of Social Sciences*. 11(1): 63-69. doi: 10.1080/09718923.2005.11892495.
- Meta Y, Basuni S, Rusdiana O. 2018. Implementation effectiveness of water utilization permit grants In Gunung Halimun Salak National Park. *Media Konservasi*. 23(1): 37-42. doi: 10.29243/medkon.23.1.37-42.
- Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. 2015. *Ijin saja tidak cukup: Belajar dari hutan kemasyarakatan (HKm) Bulukumba*. Bogor (ID): World Agroforestry Center (ICRAF) South East Asia Regional Program.
- Nandini R. 2013. Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) pada hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Lombok. *JPHT*. 10(1): 43-55. doi: 10.20886/jpht.2013.10.1.33-42.
- Noriko H, Martin H, Veronique De S, Ruth SDF, Maria B, Louis V, Arild A, Erika R. 2012. An assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing countries. *Environmental Research Letters*. 7(4): 1-12. doi: 10.1088/1748-9326/7/4/044009.
- Nurrochmat DR, Darusman D, Ekayani M. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan: Teori dan Implementasi*. Bogor (ID): IPB Press.
- Pender J, Suyanto S, Kerr J, Kato E. 2008. Impacts of the hutan kemasyarakatan social forestry Program in the Sumberjaya Watershed, Lampung Barat District of Sumatra, Indonesia. *IFPRI Discussion Paper No. 00769*.
- Purwanto EA, Sulistyastuti DR. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta (ID): Penerbit Gava Media.
- Ringle CM, Silva Dd, Bido D. 2014. Structural equation modeling with the SmartPLS. *Brazilian Journal of Marketing*. 13(2): 56-73. doi: 10.5585/remark.v13i2.2717
- Sanudin S, Awang SA, Sadono R, Purwanto RH. 2016. Perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung (Progress of community forest in Lampung Province). *J Manusia dan Lingkungan*. 23(2): 276-283. doi: 10.22146/jml.725.
- Senoaji G. 2011. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan lindung Bukit Daun di Bengkulu. *Sosiohumaniora*. 13(1): 17. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v13i1.5458.
- Setiawan D, Nurrochmat DR, Kuncahyo B. 2018. Acceptability model of the use of forest area policy in Bangka Belitung. *Media Konservasi*. 23(1): 12. doi: 10.29243/medkon.23.1.65-76.
- Steers MR. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta (ID): Erlangga.
- Suprayitno AR. 2008. Pelibatan masyarakat lokal: Upaya memberdayakan masyarakat menuju hutan lestari.

Jurnal Penyuluhan. 4(2): 135-138. doi: 10.25015/penyuluhan.v4i2.2179.

Suprayitno AR, Sumardjo S, Gani DS, Sugihen BG. 2015. Dukungan lingkungan sosial budaya terhadap kemampuan petani dalam pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Jurnal Penyuluhan. 8(1): 2-14. doi: 10.25015/penyuluhan.v8i1.9890.

Taufiqurrohman. 2014. Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan: Studi kasus hutan kemasyarakatan di Dusun Kalibiru, Kulon Progo [tesis]. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.